

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1. Tinjauan Pustaka

Pada bab ini disajikan tinjauan pustaka yang mendukung kerangka pemikiran dan hipotesis. Tinjauan Pustaka didasarkan pada penelitian sebelumnya dan memberikan gambaran tentang konsep dasar dari variabel yang diteliti. Selain itu, pada bab ini juga penulis membahas mengenai kerangka pemikiran yang berhubungan dengan hubungan variabel bebas dan terikat. Kemudian diikuti oleh hipotesis yang akan diajukan.

2.1.1. Pengangguran

2.1.1.1. Pengertian Pengangguran

Pengangguran didefinisikan sebagai situasi ketika individu yang berada dalam angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan namun sedang aktif mencari pekerjaan atau menunggu untuk dipanggil kembali untuk suatu posisi. Pandangan ini diperkuat dengan pemikiran Mankiw (2015) yang menjelaskan pengangguran sebagai cerminan kegagalan pasar tenaga kerja untuk mencapai titik ekuilibrium alami karena adanya kekakuan upah atau *market friction*. Kondisi ini mengindikasikan bahwa masalah pengangguran bukan hanya sekadar isu statistik tetapi juga masalah struktural yang menghalangi suatu negara memanfaatkan secara penuh potensi sumber daya manusianya. Tingginya angka pengangguran secara langsung memengaruhi stabilitas sosial dan kapasitas produksi ekonomi keseluruhan sehingga menjadi perhatian utama dalam perumusan kebijakan pembangunan (Suparmono, 2018).

Menurut BPS (2007) pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan, sedang mempersiapkan usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja. Untuk mengukur intensitas masalah ini digunakanlah tingkat pengangguran terbuka yaitu persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angka TPT ini menjadi indikator penting yang menunjukkan besarnya pengangguran dalam kategori angkatan kerja serta sering digunakan untuk mengukur tingkat pengangguran di suatu wilayah.

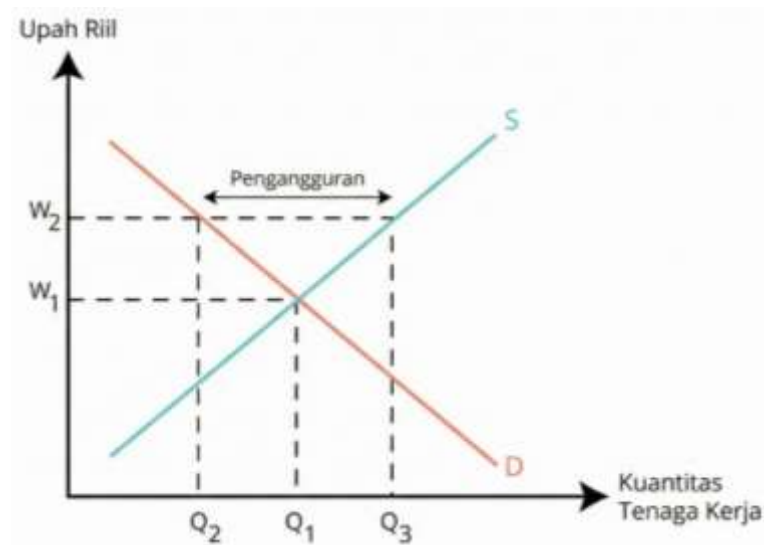
$$\text{Tingkat Pengangguran Terbuka} = \frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$$

Peningkatan laju pertumbuhan populasi secara signifikan akan secara langsung mengakibatkan lonjakan cepat pada jumlah angkatan kerja yang memasuki pasar (Sukirno, 2008). Namun, apabila penambahan angkatan kerja ini tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan baru yang memadai, maka secara alamiah akan timbul fenomena pengangguran.

2.1.1.2. Teori Pengangguran

a) Teori Klasik

Teori Klasik meyakini bahwa masalah ketenagakerjaan dapat di atasi melalui bekerjanya mekanisme pasar bebas dan fleksibilitas harga. Pandangan ini menekankan bahwa pasar tenaga kerja memiliki kecenderungan alami untuk selalu bergerak menuju keseimbangan (ekuilibrium), di mana jumlah penawaran tenaga kerja akan sama dengan jumlah permintaannya (Mankiw, 2015). Mekanisme penyesuaian menuju keseimbangan pasar tenaga kerja tersebut dapat diilustrasikan melalui kurva penawaran dan permintaan sebagai berikut:



Sumber: Mankiw (2015), diolah

Gambar 2.1 Teori Pengangguran Upah Klasik

Keterangan :

S (Supply): Penawaran Tenaga Kerja

D (Demand): Permintaan Tenaga Kerja

W (Wage): Upah Riil

Q (Quantity): Jumlah Tenaga Kerja

Berdasarkan gambar 2.1, titik keseimbangan pasar tenaga kerja tercapai pada perpotongan kurva permintaan dan penawaran, yaitu pada tingkat upah riil W_1 dengan jumlah tenaga kerja Q_1 . Namun, apabila terjadi distorsi di mana upah riil berada di atas tingkat keseimbangan, misalnya pada W_2 , maka akan terjadi kelebihan penawaran tenaga kerja. Pada tingkat upah W_2 , jumlah pencari kerja yang bersedia menawarkan jasanya Q_3 lebih besar daripada jumlah tenaga kerja yang diminta oleh perusahaan Q_2 . Selisih antara Q_3 dan Q_2 inilah yang digambarkan sebagai "Pengangguran" dalam perspektif Klasik. Menurut teori ini, jika upah bersifat fleksibel, maka upah W_2 akan segera turun kembali menuju W_1 untuk

menghilangkan kelebihan penawaran tersebut, sehingga pengangguran yang tersisa hanyalah tingkat pengangguran alami dan bukan masalah makroekonomi yang memerlukan intervensi pemerintah.

b) Teori Keynes

Berbeda dengan Pandangan Klasik, Teori Keynesian berpendapat bahwa pengangguran adalah masalah yang serius dan bersifat tak sukarela (*involuntary unemployment*) yang muncul karena rendahnya permintaan agregat dalam perekonomian. Tingkat pengangguran berhubungan erat dengan siklus bisnis sehingga pengangguran yang terjadi adalah pengangguran siklikal (Mankiw, 2015). Rendahnya konsumsi dan investasi mengakibatkan perusahaan mengurangi produksi dan permintaan tenaga kerja. Apabila pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar bebas dan upah turun, hal ini justru akan memperburuk masalah karena penurunan upah akan menurunkan daya beli masyarakat. Penurunan daya beli masyarakat akan semakin menekan permintaan agregat sehingga produsen akan semakin merugi dan tidak mampu menyerap tenaga kerja baru, memperparah resesi ekonomi. Oleh karena itu, Keynes menyarankan perlunya intervensi pemerintah melalui kebijakan fiskal dan moneter untuk meningkatkan permintaan agregat.

2.1.1.3. Jenis-jenis Pengangguran

Menurut Sukirno (2008: 328), pengangguran dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori utama, yaitu berdasarkan faktor penyebabnya dan berdasarkan karakteristik atau cirinya di pasar tenaga kerja, dengan rincian sebagai berikut:

a) Pengangguran berdasarkan penyebabnya

- Pengangguran normal friksional

Terjadi secara alami karena adanya proses penyesuaian di pasar tenaga kerja, yaitu ketika seseorang secara sukarela menganggur sementara waktu karena sedang dalam masa transisi atau aktif mencari pekerjaan baru yang menawarkan kondisi atau posisi yang lebih baik.

- Pengangguran struktural

Jenis pengangguran yang disebabkan oleh perubahan mendasar dalam struktur perekonomian suatu daerah atau negara, seperti pergeseran dari sektor pertanian ke industri. Perubahan ini mengakibatkan industri tertentu mengalami penurunan dan PHK, sementara pekerja lama tidak memiliki keahlian yang relevan untuk sektor yang baru berkembang.

- Pengangguran siklikal

Pengangguran yang timbul akibat penurunan aktivitas ekonomi atau resesi, di mana terjadi penurunan tajam pada permintaan agregat. Kondisi ini memaksa perusahaan untuk membatasi produksi, yang berujung pada pengurangan jumlah pekerja atau penutupan operasi.

- Pengangguran teknologi

Pengangguran yang terjadi karena adanya substitusi tenaga manusia oleh penggunaan mesin otomatis, robot, atau bahan kimia dalam proses produksi. Hal ini membuat peran sejumlah tenaga kerja menjadi tidak relevan lagi.

b) Pengangguran berdasarkan cirinya

- Pengangguran terbuka

Kondisi di mana jumlah lowongan pekerjaan yang tersedia jauh lebih sedikit dibandingkan dengan penambahan angkatan kerja. Akibatnya, pekerja sama sekali tidak mendapatkan pekerjaan dan secara nyata tercatat sebagai penganggur penuh waktu.

- Pengangguran tersembunyi

Terjadi ketika jumlah pekerja yang dipekerjakan dalam suatu aktivitas atau unit ekonomi melebihi jumlah tenaga kerja yang sebenarnya dibutuhkan agar kegiatan tersebut berjalan secara efisien. Kelebihan tenaga kerja ini tidak menambah *output*, sehingga tergolong sebagai pengangguran secara produktivitas.

- Pengangguran bermusim

Pengangguran yang terjadi akibat adanya pergantian musim, terutama pada sektor-sektor yang sangat bergantung pada cuaca, seperti pertanian dan perikanan. Contohnya, nelayan yang terpaksa menganggur saat musim ombak besar.

- Setengah menganggur

Suatu kondisi di mana pekerja tidak bekerja secara penuh (kurang dari jam kerja normal, misalnya 35 jam per minggu). Ini dapat mencakup pekerja yang berpindah dari desa ke kota dan tidak mendapat pekerjaan penuh, atau mereka yang sebenarnya ingin bekerja lebih lama tetapi terbatasnya kesempatan kerja.

2.1.1.4.Faktor Penyebab Pengangguran

Menurut Mankiw (2015:183), terdapat empat faktor utama yang menyebabkan pengangguran.

a) Proses Pencarian Kerja (*Job Search*)

Pengangguran dapat muncul sebagai akibat dari Proses Pencarian Kerja yang memakan waktu dan melekat secara alami pada pasar tenaga kerja yang dinamis. Meskipun lowongan tersedia, ketidaksempurnaan informasi memaksa pekerja untuk menghabiskan waktu mencari pekerjaan yang paling sesuai dengan keahlian mereka. Jeda waktu yang terjadi selama proses pencocokan ini menyebabkan Pengangguran Friksional, yang bukan disebabkan oleh kurangnya permintaan agregat, melainkan oleh waktu yang diperlukan untuk menyalurkan pekerja ke posisi yang paling produktif.

b) Hukum Upah Minimum (*Minimum Wage Laws*)

Hukum Upah Minimum menjadi salah satu penyebab utama kekakuan upah yang menciptakan Pengangguran Struktural. Ketika UMP ditetapkan di atas tingkat upah keseimbangan yang mampu membersihkan pasar, hal itu secara efektif mengurangi permintaan tenaga kerja dari perusahaan. Kenaikan biaya tenaga kerja ini memaksa perusahaan mengurangi perekrutan atau memilih untuk berinvestasi pada teknologi padat modal, sehingga memunculkan kelebihan penawaran tenaga kerja yang tidak terserap, khususnya di segmen pekerja muda atau kurang terampil.

c) Serikat Pekerja (*Unions*)

Kekuatan serikat pekerja dalam proses tawar-menawar kolektif juga menyebabkan upah dipertahankan di atas tingkat keseimbangan pasar. Serikat pekerja berfungsi sebagai kartel yang meningkatkan upah anggotanya, tetapi dengan konsekuensi mengurangi permintaan tenaga kerja dari perusahaan dan menciptakan Pengangguran Struktural bagi non-anggota atau pekerja di sektor lain.

Dengan demikian, serikat pekerja dapat memberikan manfaat bagi anggotanya yang terserap, namun menciptakan dampak negatif bagi pasar tenaga kerja secara keseluruhan.

d) Efisiensi Upah (*Efficiency Wages*)

Perusahaan melakukan ini bukan karena diwajibkan, melainkan sebagai strategi untuk meningkatkan produktivitas pekerja, mengurangi tingkat turnover, dan meminimalisir risiko moral hazard. Keputusan manajerial yang rasional ini secara tidak sengaja membatasi jumlah tenaga kerja yang direkrut, karena perusahaan memprioritaskan kualitas dan efisiensi tenaga kerja daripada kuantitas, sehingga turut berkontribusi pada Pengangguran Struktural.

2.1.1.5. Dampak Pengangguran

Menurut Mankiw (2015: 183), dampak atau biaya yang ditimbulkan oleh pengangguran dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori utama yaitu:

a) Biaya Ekonomi (*Economic Costs*)

Dampak yang paling substansial dari pengangguran adalah hilangnya *output* atau kerugian pada Produk Domestik Bruto yang seharusnya dapat dihasilkan. Ketika sejumlah besar angkatan kerja menganggur sumber daya tenaga kerja produktif tidak dimanfaatkan secara optimal. Kerugian ini bersifat permanen karena *output* yang hilang hari ini tidak dapat dipulihkan di masa depan. Kondisi ini menyebabkan perekonomian beroperasi di bawah batas potensi produksinya sebuah inefisiensi yang sering dianalisis melalui Hukum Okun yang mengaitkan tingkat pengangguran dengan kesenjangan PDB.

b) Biaya Non-Ekonomi (Non-Economic Costs)

Selain kerugian finansial pengangguran juga menimbulkan biaya personal dan sosial yang mendalam. Dampak non-ekonomi ini mencakup penurunan signifikan pada kesejahteraan individu dan sosial. Secara personal pekerja yang kehilangan pekerjaan sering mengalami tekanan psikologis kehilangan harga diri dan penurunan kesehatan mental. Lebih lanjut pengangguran jangka panjang menyebabkan penyusutan modal manusia (human capital depreciation) di mana keterampilan pekerja menjadi usang dan sulit untuk kembali bersaing di pasar kerja. Di tingkat sosial tingkat pengangguran yang tinggi dapat meningkatkan masalah sosial seperti kejahatan dan ketidakstabilan sosial yang pada akhirnya mengancam kohesi dan fungsi masyarakat.

2.1.1.6. Cara Mengatasi Pengangguran

Menurut Try Wahyu Utami et al. (2023), pengangguran terjadi ketika penawaran tenaga kerja lebih besar daripada permintaannya, sehingga diperlukan upaya sistematis untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan memperluas kesempatan kerja. Oleh karena itu, pengangguran dapat di atasi melalui beberapa langkah berikut:

a) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM)

Salah satu cara utama mengurangi pengangguran adalah dengan meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan. Upaya ini memberikan tenaga kerja pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri sehingga mereka lebih siap memasuki pasar kerja yang semakin kompetitif.

b) Menciptakan lapangan pekerjaan yang baru

Pengangguran dapat ditekan dengan memperluas lapangan kerja melalui pengembangan sektor-sektor produktif, seperti pertanian, industri, jasa, perikanan, dan pariwisata. Selain itu, pemerintah juga dapat mendorong iklim investasi yang kondusif agar investor lebih tertarik membuka kegiatan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja.

c) Mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)

UMKM merupakan sektor usaha yang memiliki kemampuan besar dalam menyerap tenaga kerja dan membuka peluang wirausaha baru. Melalui pengembangan UMKM, masyarakat terdorong untuk berwirausaha sehingga tidak bergantung pada pekerjaan formal, dan pada akhirnya dapat membantu menurunkan tingkat pengangguran.

2.1.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi

2.1.2.1. Pengertian Laju Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Mankiw (2015: 210) laju pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan berkelanjutan dalam *output* barang dan jasa total suatu perekonomian per kapita dari waktu ke waktu yang secara fundamental didorong oleh akumulasi modal pertumbuhan tenaga kerja dan kemajuan teknologi. Dengan kata lain, akumulasi modal dan inovasi teknologi sebagai mesin utama pertumbuhan yang bersifat jangka panjang. Keberhasilan LPE harus diukur bukan hanya dari angka kenaikan PDB tahunan tetapi juga dari kualitas pertumbuhan yang mampu menghasilkan struktur ekonomi yang lebih tangguh dan berkelanjutan, serta memperkuat kapasitas produktif di masa depan.

Menurut Suparmono (2018) pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan kuantitatif dari nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu wilayah atau perekonomian dalam periode tertentu yang diukur melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) riil. Definisi ini berfokus pada aspek terukur dan agregat yang menunjukkan peningkatan kemampuan produktif suatu daerah dalam menghasilkan *output* dari tahun ke tahun. Hal ini menjadikan PDRB sebagai tolak ukur fundamental untuk melihat kemajuan dan kinerja ekonomi suatu wilayah yang menunjukkan adanya ekspansi kapasitas produksi dalam jangka waktu tertentu.

Pertumbuhan ekonomi negara dapat dilihat dari PDB. PDB digunakan sebagai alat untuk menilai/mengukur pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemakmuran masyarakat. laju pertumbuhan ekonomi dapat diukur dengan menggunakan laju pertumbuhan PDB riil. Penggunaan PDB Riil dalam perhitungan LPE sangat krusial karena bertujuan untuk menghilangkan bias inflasi sehingga angka pertumbuhan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan peningkatan volume fisik barang dan jasa yang diproduksi. Kenaikan PDB Riil dari 1 periode ke periode berikutnya merupakan indikator kunci yang menunjukkan bahwa kapasitas produktif suatu perekonomian telah meluas.

2.1.2.2. Faktor-Faktor yang Menentukan Laju Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Suparmono (2018), terdapat beberapa faktor utama yang menentukan laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah atau negara, yang secara umum dikelompokkan menjadi:

a) Sumber Daya Alam (*Natural Resources*)

Merupakan faktor fundamental yang meliputi kekayaan tanah, letak geografis, iklim, dan kekayaan mineral yang tersedia. Ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang efisien adalah modal awal untuk pembangunan ekonomi.

b) Sumber Daya Manusia (*Human Resources*)

Merupakan kualitas dan kuantitas angkatan kerja yang tersedia. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama melalui pendidikan dan kesehatan, merupakan kunci untuk meningkatkan produktivitas yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi.

c) Akumulasi Modal (*Capital Accumulation*)

Merujuk pada peningkatan stok modal fisik, seperti infrastruktur, mesin, dan peralatan yang digunakan dalam proses produksi. Tingkat investasi yang tinggi dalam pembentukan modal baru sangat diperlukan untuk meningkatkan kapasitas produksi suatu wilayah.

d) Kemajuan Teknologi dan Kewirausahaan (*Technological Progress and Entrepreneurship*)

Merupakan faktor dinamis yang paling menentukan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Adopsi teknologi baru dan inovasi kewirausahaan memungkinkan efisiensi produksi meningkat, sehingga *output* dapat bertambah tanpa harus menambah *input* sumber daya alam atau tenaga kerja secara proporsional.

2.1.3 Upah Minimum Provinsi

2.1.3.1. Pengertian Upah Minimum Provinsi

Dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013, upah minimum merupakan upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaringan pengaman. Sedangkan upah minimum provinsi merupakan upah minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten/kota di 1 provinsi. Upah minimum sendiri memiliki tujuan agar kualitas penduduk yang berpendapatan rendah menjadi lebih baik. Adanya peningkatan upah minimum akan menyebabkan pendapatan masyarakat meningkat, sehingga kesejahteraan pun meningkat (Adinda & Asmara, 2024).

Menurut Arisusanti & Bendesa (2023), dalam teori yang dikemukakan oleh golongan klasik baru yang berpendapat bahwa upah nominal akan selalu berubah sejalan dengan perubahan dalam permintaan dan penawaran tenaga kerja. Menurut golongan Keynes baru, upah dalam pasar ditentukan melalui perjanjian kontrak antara pekerja dan majikan atau perusahaan, dan tidak akan dipengaruhi oleh fluktuasi dalam permintaan dan penawaran tenaga kerja yang berlaku. Dengan kata lain, upah cenderung tetap pada tingkat yang telah disepakati dalam kontrak antara tenaga kerja dan majikan atau perusahaan. Penurunan permintaan tenaga kerja tidak akan menyebabkan penurunan upah nominal, dan sebaliknya, peningkatan permintaan tenaga kerja tidak akan segera meningkatkan upah nominal.

Selama kontrak kerja antara tenaga kerja dan majikan tetap berlaku, upah akan tetap konstan, meskipun tidak ada keseimbangan antara permintaan dan

penawaran tenaga kerja di pasar (Sukirno, 2008). Upah memiliki dua perspektif yang berbeda. Dari sudut pandang produsen, upah dianggap sebagai biaya yang harus dibayarkan kepada pekerja dan merupakan bagian dari biaya total produksi. Namun, dari sudut pandang pekerja, upah dianggap sebagai pendapatan yang diperoleh dari hasil pemanfaatan tenaganya oleh produsen.

Selanjutnya, menurut Dewan Penelitian Pengupahan Nasional, upah diartikan sebagai suatu penerimaan sebagai imbalan dari pemberian kerja seseorang kepada penerima kerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah maupun yang akan dilakukan. Upah berfungsi sebagai jaminan kelangsungan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan dan dinyatakan serta dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan, undang-undang dan peraturan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pemberi kerja dan penerima kerja.

Definisi-definisi di atas meskipun berbeda-beda artinya tetapi jelas memiliki maksud yang sama maka dapat disimpulkan bahwa upah dapat diartikan sebagai pengganti atas jasa yang telah diberikan oleh tenaga kerja kepada sebuah perusahaan. Oleh karena itu dalam pemberian upah, perusahaan perlu memperhatikan prinsip adil dan layak. Yang dimaksud adil adalah bahwa besarnya upah harus dikaitkan dengan nilai relatif pekerjaan-pekerjaan. Dengan kata lain pekerjaan-pekerjaan sejenis memperoleh bayaran yang sama. Sedangkan yang dimaksud layak adalah bahwa besarnya upah yang diberikan pada karyawan harus sama dengan pembayaran yang diterima karyawan yang serupa di perusahaan lain. Dari pengertian di atas ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu:

1. Ada dua pihak yang mempunyai dan berkewajiban yang berbeda tetapi saling mempengaruhi dan saling menentukan yang satu dengan yang lainnya.
2. Pihak pekerja yang memikul kewajiban dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan dan perintah yang diberikan oleh pengusaha/ organisasi serta berhak untuk mendapatkan upah atau kompensasi.
3. Pihak pengusaha / organisasi memikul kewajiban untuk memberikan upah atau ganjaran atas pelaksanaan pekerjaan oleh pekerja.
4. Selanjutnya hak dan kewajiban ini timbul pada saat adanya hubungan kerja.

Teori Upah-efisiensi (*efficiency wage*) menurut Mankiw (2015) menyatakan bahwa upah yang tinggi dapat membuat pekerja akan lebih produktif. Perusahaan lebih diuntungkan jika mempertahankan upah tinggi meskipun surplus tenaga kerja. Jadi, semakin tinggi upah semakin besar juga kerugian bagi pekerja, karena perusahaan beroperasi lebih efisien membayar pekerjanya dengan upah yang lebih tinggi, maka perusahaan dapat menganggap bahwa mempertahankan upah di atas tingkat yang menyeimbangkan penawaran dan permintaan adalah menguntungkan.

Menurut Mankiw (2015) menjelaskan bagaimana upah dapat mempengaruhi produktivitas tenaga kerja, antara lain:

1. Pekerja yang dibayar berdasarkan upah yang memadai bisa membeli lebih banyak nutrisi, sehingga menghasilkan pekerja yang lebih sehat dan lebih produktif. Teori ini berlaku di negara-negara yang masih miskin dan berkembang.

2. Teori yang relevan bagi negara-negara maju, menyatakan bahwa upah yang tinggi akan menurunkan keluar masuknya karyawan. Hal ini berarti bahwa semakin besar perusahaan membayar pekerjanya, maka semakin besar insentif mereka untuk tetap bekerja dalam perusahaan tertentu. Dengan membayar upah yang tinggi, perusahaan akan mengurangi frekuensi pekerja yang keluar dari pekerjaan, sekaligus mengurangi waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk menarik dan melatih pekerja baru.
3. Kualitas rata-rata dari tenaga kerja bergantung pada upah yang dibayarkan perusahaan pada karyawannya. Jika perusahaan mengurangi upahnya maka pekerja terbaik akan mengambil pekerja di tempat lain, meninggalkan perusahaan dengan para pekerja tidak terdidik yang memiliki lebih sedikit alternatif.
4. Upah yang tinggi meningkatkan upaya pekerja. Teori ini menegaskan bahwa perusahaan tidak dapat memantau dengan sempurna upaya para pekerja, dan para pekerja harus memutuskan sendiri sejauh mana mereka akan bekerja keras. Para pekerja dapat memilih untuk bekerja keras, atau mereka dapat memilih untuk bermalas-malasan dengan resiko tertangkap basah dan dipecat.

2.1.3.2. Jenis-jenis Upah Minimum

Menurut Mankiw (2015), jenis-jenis upah diklasifikasikan berdasarkan peranannya dalam ekonomi makro, Berikut adalah jenis-jenisnya:

- a.) Upah nominal adalah jumlah uang tunai yang diterima oleh pekerja sebelum disesuaikan dengan tingkat inflasi. Ini adalah angka moneter yang tertera pada slip gaji.

b.) Upah nyata adalah daya beli dari upah nominal yang telah disesuaikan dengan tingkat harga atau inflasi. Upah jenis ini merupakan indikator yang paling akurat untuk mengukur kesejahteraan atau pendapatan riil pekerja.

c.) Upah minimum merupakan harga dasar yang ditetapkan oleh pemerintah dan wajib dibayarkan kepada pekerja.

d.) Upah efisiensi adalah tingkat upah yang secara sukarela dibayarkan oleh perusahaan di atas tingkat keseimbangan pasar. Upah ini diberikan berdasarkan strategi manajerial, dengan tujuan utama untuk meningkatkan produktivitas pekerja dan mengurangi biaya jangka panjang.

2.1.3.3.Faktor-faktor yang Memengaruhi Tingkat Upah

Menurut Mankiw (2015), faktor-faktor yang memengaruhi tingkat upah, khususnya yang menyebabkan upah berada di atas tingkat keseimbangan pasar, dipengaruhi oleh kebijakan dan strategi efisiensi perusahaan. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

a) Jam Kerja

Jam kerja merupakan waktu yang digunakan seseorang untuk melakukan pekerjaan dan perusahaan tidak selalu dapat memantau dengan sempurna upaya para pekerja dalam jam kerja tersebut. Teori Upah Efisiensi (*Efficiency Wage Theory*) menyatakan bahwa upah yang tinggi akan meningkatkan upaya pekerja. Hal ini karena upah tinggi membuat risiko dipecat menjadi sangat mahal. Dengan demikian, upah yang tinggi berfungsi sebagai insentif bagi pekerja untuk bekerja keras dan fokus selama jam kerja, yang pada akhirnya memengaruhi tingkat upah yang ditetapkan perusahaan.

b) Lama Kerja

Lama kerja atau curahan waktu yang dihabiskan tenaga kerja dalam perusahaan dapat dipengaruhi oleh besaran upah yang diterima. Upah yang tinggi akan menurunkan tingkat keluar masuknya karyawan (*worker turnover*). Ini berarti bahwa semakin besar perusahaan membayar pekerjanya, semakin besar insentif mereka untuk tetap bekerja dalam jangka waktu yang panjang. Kondisi ini menguntungkan perusahaan karena mengurangi biaya waktu dan sumber daya yang dibutuhkan untuk menarik dan melatih pekerja baru, sehingga upah tinggi dianggap sebagai investasi yang efisien.

c) Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan sangat terkait dengan kualitas dan keterampilan angkatan kerja yang ditawarkan. Kualitas rata-rata dari tenaga kerja bergantung pada upah yang dibayarkan perusahaan pada karyawannya. Jika suatu perusahaan menawarkan upah yang tinggi, hal itu akan menarik pelamar kerja yang lebih terdidik dan memiliki kualitas yang lebih baik (*higher-quality pool of workers*). Sebaliknya, jika perusahaan mengurangi upahnya, pekerja terbaik yang biasanya berpendidikan lebih tinggi akan mencari pekerjaan di tempat lain. Oleh karena itu, perusahaan sering kali menetapkan upah tinggi untuk memastikan mereka mempertahankan dan menarik tenaga kerja berpendidikan tinggi.

2.1.3.4. Pihak Berwenang Penetapan Upah Minimum

Berdasarkan amanat Pasal 88C ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, pihak-pihak yang memiliki kewenangan legal dan peran

strategis dalam mekanisme penetapan upah minimum dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Gubernur (Otoritas Penetapan)

Gubernur memegang kewenangan tertinggi dan bersifat final dalam menetapkan upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten/kota. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, Gubernur bertindak sebagai eksekutor kebijakan yang menerbitkan Surat Keputusan mengenai besaran upah minimum. Kewenangan ini merupakan bentuk desentralisasi di mana kepala daerah memiliki tanggung jawab untuk menyesuaikan standar upah dengan kondisi ekonomi dan inflasi daerah, namun tetap terikat pada formula perhitungan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

b) Dewan Pengupahan Daerah

Dewan Pengupahan Daerah adalah lembaga non-struktural yang bersifat tripartit, yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur dalam rangka penetapan upah minimum. Lembaga ini memiliki peran vital dalam menghitung besaran upah berdasarkan variabel-variabel ekonomi sebelum diajukan kepada Gubernur.

c) Pemerintah Pusat (Kementerian Ketenagakerjaan)

Pemerintah Pusat, melalui Kementerian Ketenagakerjaan, bertindak sebagai regulator utama yang menetapkan landasan hukum dan formula perhitungan upah minimum secara nasional. Pemerintah Pusat memastikan adanya standar kebijakan yang seragam di seluruh wilayah Indonesia untuk menjaga iklim investasi dan

kepastian hukum, yang kemudian menjadi pedoman wajib bagi Gubernur dan Dewan Pengupahan di daerah.

2.1.4 Investasi Asing

2.1.4.1. Pengertian Investasi Asing

Perekonomian nasional memerlukan adanya penambahan modal atau investasi yang berkelanjutan agar proses pembangunan dapat berjalan secara optimal. Suparmono (2018) menjelaskan bahwa investasi memegang peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi karena hal ini merupakan pembentukan modal baru yang menjadi tumpuan bagi sektor swasta untuk menghasilkan barang dan jasa. Sumber pendanaan modal ini dapat berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.

Investasi asing merujuk pada upaya penanaman modal yang dilakukan oleh pihak luar negeri untuk menghasilkan barang dan jasa melalui sarana-sarana produksi yang dimiliki (Hidayah & Aji, 2022). Sejalan dengan itu, berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, investasi asing diartikan sebagai seluruh kegiatan menanam modal untuk menjalankan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia, yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya atau yang membiayai bersama dengan penanam modal dalam negeri. Oleh karena itu, investasi asing dipandang sebagai salah satu upaya strategis untuk meningkatkan ketersediaan modal dan memacu kegiatan ekonomi di Indonesia.

2.1.4.2. Macam-macam Investasi

Investasi merupakan elemen krusial dalam pertumbuhan ekonomi yang dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis, berdasarkan kriteria tertentu. Menurut Hidayah & Aji (2022), investasi dapat dikelompokkan berdasarkan dua kategori utama yaitu:

a) Berdasarkan Sumber Pembiayaan

- Investasi Dalam Negeri (PMDN)

Investasi dalam negeri merupakan kegiatan penanaman modal yang sumber pendanaannya berasal dari modal investor atau penanam modal di dalam negeri sendiri. Modal yang digunakan murni berasal dari kekayaan nasional tanpa melibatkan pihak asing.

- Investasi Asing

Investasi asing merupakan penanaman modal yang sumber pendanaannya berasal dari luar negeri, yang dilakukan oleh penanam modal asing. Jenis investasi ini sangat krusial dalam menstimulasi pembangunan ekonomi dengan memasok modal dari eksternal.

b) Berdasarkan Jenis Aset

- Investasi Langsung (*Direct Investment*)

Investasi langsung merupakan investasi yang melibatkan pembelian aset-aset riil dan fisik di negara penerima. Contohnya meliputi kegiatan pendirian pabrik baru, pembelian mesin, atau perluasan fasilitas produksi.

- Investasi Tidak Langsung (*Portfolio Investment*)

Investasi tidak langsung merupakan investasi yang melibatkan pembelian aset-aset keuangan yang bersifat lebih likuid. Contohnya adalah pembelian saham, obligasi, atau surat berharga lainnya yang diperdagangkan di pasar modal.

2.1.4.3. Tujuan Investasi Asing

Investasi asing memegang peranan krusial dan memiliki berbagai sasaran utama dalam menopang pertumbuhan ekonomi suatu negara. Berikut adalah beberapa tujuan utama yang ingin dicapai melalui penanaman modal asing:

- a) Integrasi Ekonomi Internasional investasi asing langsung dianggap sebagai elemen kunci dalam integrasi ekonomi global. Hal ini karena investasi asing mampu menciptakan koneksi dan hubungan ekonomi yang stabil serta berkelanjutan antara dua yurisdiksi atau lingkup perekonomian negara yang berbeda.
- b) Transfer Teknologi Penanaman modal yang sering disebut investasi global langsung ini berfungsi sebagai sarana penting dan efektif untuk memfasilitasi transfer pengetahuan, teknologi, dan praktik manajemen antarnegara. Proses ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan efisiensi dan inovasi di negara penerima modal.
- c) Akses dan Perluasan Pasar investasi asing membuka peluang bagi perusahaan domestik untuk memasarkan produknya ke pasar internasional, karena perusahaan tersebut telah mendapatkan akses ke jaringan pasar asing. Perluasan perdagangan internasional ini, melalui masuk dan keluarnya nilai saham, aliran

modal, dan pendapatan dari negara mitra, dapat menjadi alat vital bagi pembangunan ekonomi suatu negara.

2.1.5 Kebijakan Hilirisasi

Kebijakan Hilirisasi merupakan agenda strategis pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah komoditas sumber daya alam dengan mewajibkan pengolahan bahan mentah menjadi produk bernilai lebih tinggi di dalam negeri. Kebijakan ini mengubah struktur ekonomi dari berbasis ekspor komoditas mentah menjadi berbasis industri pengolahan. Kewajiban pengolahan dan pemurnian hasil tambang di dalam negeri, misalnya, diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Penerapan kebijakan hilirisasi sangat berkaitan erat dengan variabel investasi, yang menurut Hidayah & Aji (2022) merupakan pembentukan modal yang menjadi tumpuan bagi sektor swasta untuk menghasilkan barang dan jasa. Implementasi hilirisasi menuntut investasi dalam skala besar untuk pembangunan infrastruktur industri pengolahan dan pemurnian. Kebijakan ini berupaya memutus mata rantai ketergantungan pada ekspor bahan mentah, sekaligus bertujuan untuk memaksimalkan nilai tambah (*added value*) domestik dan meningkatkan penerimaan devisa negara melalui produk jadi.

2.1.6 Penelitian Terdahulu

Setiap kegiatan penelitian memerlukan landasan teori dan hasil penelitian sebelumnya sebagai referensi dan acuan utama. Penelaahan terhadap penelitian terdahulu merupakan langkah penting yang dilakukan oleh peneliti untuk

memperoleh bahan perbandingan, menemukan inovasi baru yang relevan, serta membantu memposisikan penelitian saat ini. Selain itu, kajian ini berfungsi untuk memperkuat dan menunjukkan orisinalitas dari penelitian yang akan dilaksanakan.

Pada bagian ini, peneliti akan menyajikan rangkuman hasil-hasil penelitian terdahulu yang memiliki kaitan erat atau relevansi dengan topik yang sedang dikaji. Melalui tinjauan ini, diharapkan dapat terlihat sejauh mana kontribusi dan orisinalitas dari penelitian yang akan dilakukan. Penelitian-penelitian yang mempunyai keterkaitan dengan riset ini akan disajikan dalam bentuk tabel berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Penelitian dari Syarif & Suriadi (2025) dengan judul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Kesempatan Kerja, dan Angkatan Kerja Terhadap Pengangguran di Sulawesi Tenggara”	<ul style="list-style-type: none"> • Pengangguran • Pertumbuhan Ekonomi 	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan Hilirisasi • Upah Minimum Provinsi • Investasi Asing 	Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan tidak signifikan, kesempatan kerja berpengaruh negatif dan signifikan, sedangkan angkatan kerja berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pengangguran di Sulawesi Tenggara.	Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan (JPEP), Vol. 10, No. 1, 2025.
2	Penelitian dari Mulyadi et al. (2022) dengan judul “Analisis Pengaruh kebijakan dan Inflasi terhadap Pengangguran Terbuka di Sulawesi Tenggara”	<ul style="list-style-type: none"> • Pengangguran • Upah Minimum Provinsi 	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan Hilirisasi • laju pertumbuhan ekonomi • Investasi Asing 	Upah Minimum Provinsi (UMP) berpengaruh negatif dan, sedangkan inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pengangguran terbuka di Sulawesi Tenggara.	Jurnal Ekonomi Pembangunan (JEP), Vol. 12, Issue 01, 2022.
3	Penelitian dari Rahim & Milia (2025) dengan judul “Pengaruh Investasi	<ul style="list-style-type: none"> • Pengangguran • Investasi Asing 	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan Hilirisasi • laju pertumbuhan 	Investasi Asing dan Investasi Domestik tidak berpengaruh signifikan terhadap penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tingkat	Jurnal Ekonomi Pembangunan (JEP), Vol. 15, Issue 1, 2025.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Domestik dan Asing terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia: Analisis Data Panel”		ekonomi • Upah Minimum Provinsi	provinsi di Indonesia.	
4	Penelitian dari Akhmadi (2024) dengan judul “Analisis Dampak Hilirisasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia”	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan Hilirisasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Upah Minimum Provinsi • Investasi Asing 	Kebijakan hilirisasi merupakan kunci pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6-7% dan memiliki potensi nilai tambah yang signifikan bagi perekonomian negara di Indonesia.	HATTA: Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Ilmu Ekonomi, Vol. 2, No. 1, 2024.
5	Penelitian dari Kuswiyati & Utomo (2022) dengan judul “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, IPM, Pertumbuhan Ekonomi, dan Investasi terhadap Tingkat Pengangguran di Sulawesi Selatan”	<ul style="list-style-type: none"> • Pengangguran • Pertumbuhan Ekonomi • Investasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan Hilirisasi • Upah Minimum Provinsi 	Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif, investasi berpengaruh negatif, sedangkan pengeluaran pemerintah dan IPM tidak berpengaruh terhadap tingkat pengangguran di Sulawesi Selatan.	Ekonomis: <i>Journal of Economics and Business</i> , Vol. 6, No. 2, 2022.
6	Penelitian dari Saputra et al. (2024) dengan judul “Pengaruh Upah Minimum Regional, Investasi, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengangguran Terbuka di Kota Mataram”	<ul style="list-style-type: none"> • Pengangguran • Pertumbuhan Ekonomi • Upah Minimum • Investasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan Hilirisasi 	Upah minimum regional dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan, sedangkan investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran di Mataram.	JSEH (Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora), Vol. 10, No. 2, 2024.
7	Penelitian dari Neti & Sari (2024) dengan judul “Analisis Pengangguran Terdidik di Indonesia”	<ul style="list-style-type: none"> • Pengangguran • Pertumbuhan Ekonomi • Upah Minimum Provinsi • Investasi Asing 	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan Hilirisasi 	Upah Minimum Provinsi berpengaruh positif dan signifikan, pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan, sedangkan investasi asing berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pengangguran	Media Riset Ekonomi Pembangunan (MedREP), Vol. 1, No. 3, 2024.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				terdidik di Indonesia.	
8	Penelitian dari Adinda & Asmara (2024) dengan judul “Pengaruh Jumlah Penduduk, Upah Minimum, Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pendidikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Gresik”	<ul style="list-style-type: none"> • Pengangguran • Pertumbuhan Ekonomi • Upah Minimum 	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan Hilirisasi • Investasi Asing 	Upah Minimum dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan, sedangkan tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran di Gresik.	Oikos: Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi dan Ilmu Ekonomi, Vol. 8, No. 2, 2024.
9	Penelitian dari Khoirunnisa (2020) dengan judul “Pengaruh Upah Minimum, Investasi, dan Jumlah Kunjungan Wisatawan terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi NTB”	<ul style="list-style-type: none"> • Pengangguran • Upah Minimum • Investasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan Hilirisasi • laju pertumbuhan ekonomi 	Upah Minimum berpengaruh negatif dan signifikan, investasi berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan jumlah kunjungan wisatawan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran di Nusa Tenggara Barat.	Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya, Vol. 8, No. 2, 2020.
10	Penelitian dari Arisusanti & Bendesa (2023) dengan judul “Analisis Pengaruh Investasi, Upah, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengangguran Terdidik Lulusan Perguruan Tinggi di Indonesia”	<ul style="list-style-type: none"> • Pengangguran • Pertumbuhan Ekonomi • Upah Minimum Provinsi • Investasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan Hilirisasi 	Investasi berpengaruh positif dan tidak signifikan, Upah Minimum Provinsi berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran terdidik di Indonesia.	E-Jurnal EP Unud, Vol. 12, No. 06, 2023.
11	Penelitian dari Putri & Shidiqie (2022) dengan judul “Analisis Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran	<ul style="list-style-type: none"> • Pengangguran • Investasi Asing 	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan Hilirisasi • Upah Minimum Provinsi 	PDB, PMA, dan teknologi berpengaruh negatif, sedangkan PMDN tidak berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka di Indonesia.	Jurnal Kebijakan Ekonomi dan Keuangan, Vol. 1, Issue 2, 2022.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Terbuka di Indonesia”				
12	Penelitian dari Wau et al. (2022) dengan judul “Analisis Strategis Kebijakan Hilirisasi Mineral: Implikasi Ekonomi dan Pengaruhnya terhadap Perekonomian Indonesia”	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan Hilirisasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Upah Minimum Provinsi • Investasi Asing 	Kebijakan hilirisasi mineral menciptakan lapangan kerja baru, mengurangi tingkat pengangguran, dan meningkatkan pendapatan negara dari sektor non-migas di Indonesia.	<i>Journal Publicuho</i> , Vol. 7, No. 3, 2024.
13	Penelitian dari Deddy et al. (2023) dengan judul “Strategi Hilirisasi di Indonesia dalam Menghadapi Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Nikel terhadap Tingkat Pengangguran dan Cadangan Devisa Negara”	<ul style="list-style-type: none"> • Pengangguran • Kebijakan Hilirisasi 	<ul style="list-style-type: none"> • laju pertumbuhan ekonomi • Upah Minimum Provinsi 	Kebijakan larangan ekspor bijih nikel (hilirisasi) mampu menekan angka pengangguran serta meningkatkan hasil nilai ekspor dan berdampak pada cadangan devisa negara di Indonesia.	Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP), Vol. 7, No. 3, 2023.
14	Penelitian dari Hidayah & Aji (2022) dengan judul “Pengaruh Inflasi dan Investasi terhadap Tingkat Pengangguran di Indonesia”	<ul style="list-style-type: none"> • Pengangguran • Investasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan Hilirisasi • Laju Perumbuhan Ekonomi • Upah Minimum Provinsi 	Inflasi tidak berpengaruh, sedangkan investasi berpengaruh positif terhadap tingkat pengangguran terbuka di Indonesia.	<i>Independent: Journal Of Economics</i> , Vol. 2, No. 3, 2022.
15	Penelitian dari Arifin & Heriqbaldi (2023) dengan judul “ <i>The Effect of Digitalization and Covid-19 Pandemic on Youth Unemployment in Indonesia</i> ”	<ul style="list-style-type: none"> • Pengangguran 	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan Hilirisasi 	Digitalisasi dan Pandemi Covid-19 berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan Pengangguran Muda di Indonesia.	<i>International Journal of Economics Development Research</i> , Vol. 4, 2023.
16	Penelitian dari Mohamed (2024) dengan judul “ <i>Economic</i> ”	<ul style="list-style-type: none"> • Pengangguran • Pertumbuhan Ekonomi 	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan Hilirisasi • Upah Minimum 	laju pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap pengangguran, sehingga	<i>Journal of Economic Structures</i> , Vol. 13:16,

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<i>Growth and Unemployment Nexus: Empirical Test of Okun's Law in Somalia</i>		Provinsi • Investasi Asing	hukum Okun tidak berlaku di Somalia.	2024.
17	Penelitian dari (Nguyen et al., 2024) dengan judul " <i>Foreign Direct Investment and Employments in Asia Pacific Nations: The Moderating Role of Labor Quality</i> "	<ul style="list-style-type: none"> • Pengangguran • Investasi Asing 	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan Hilirisasi • laju pertumbuhan ekonomi • Upah Minimum Provinsi 	Investasi asing berpengaruh positif dan signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja, dan kualitas tenaga kerja memoderasi hubungan antara investasi asing dan lapangan kerja pada negara di Asia Pasifik.	Heliyon, Vol. 10, 2024.
18	Penelitian dari (Ugbomhe & Abdul, 2023) dengan judul " <i>The Impact of Industrialization on Unemployment in Nigeria: An Empirical Analysis</i> "	<ul style="list-style-type: none"> • Pengangguran • Industrialisasi (Relevan dengan Kebijakan Hilirisasi) 	<ul style="list-style-type: none"> • Upah Minimum Provinsi 	Industrialisasi dan aktivitas perdagangan internasional berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat pengangguran di Nigeria.	IIARD <i>International Journal of Economics and Business Management</i> , Vol. 11, No. 3, 2025.

2.2. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan model konseptual mengenai bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penelitian yang penting, di mana penjelasan tersebut berfungsi untuk menguraikan hubungan antar variabel independen dan dependen secara teoritis agar alur penelitian dapat dipahami secara sistematis (Sugiyono, 2020). Oleh karena itu, bagian ini menjadi kompas utama bagi peneliti untuk merumuskan landasan argumen yang kuat serta membangun dasar hipotesis sebelum melangkah pada tahap pengujian empiris.

2.2.1. Hubungan Laju Pertumbuhan Ekonomi dengan Pengangguran

Tingginya laju pertumbuhan ekonomi menuntut adanya penambahan *input* produksi, terutama tenaga kerja, untuk memenuhi target *output* yang lebih besar. Hubungan ini sering dikaitkan dengan Hukum Okun yang menjelaskan bahwa terdapat korelasi negatif antara pertumbuhan *output* dan pengangguran, di mana ekspansi ekonomi yang melampaui pertumbuhan produktivitas tenaga kerja akan menciptakan lapangan kerja baru. Oleh karena itu, dari uraian di atas menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan negatif dengan tingkat pengangguran, di mana peningkatan aktivitas ekonomi akan mendorong penyerapan tenaga kerja (Arisusanti & Bendesa, 2023).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Saputra et al. (2024) yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka, di mana variabel tersebut menjadi penentu krusial dalam penyediaan lapangan kerja. Semakin tinggi laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah, maka akan semakin besar peluang terciptanya kesempatan kerja yang mampu menyerap angkatan kerja, sehingga secara efektif menurunkan angka pengangguran di wilayah tersebut.

Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dipandang sebagai syarat mutlak untuk memperluas kapasitas pasar tenaga kerja dalam menampung lonjakan angkatan kerja baru yang masuk setiap tahunnya. Mekanisme ini bekerja melalui peningkatan permintaan agregat yang mendorong perusahaan untuk melakukan ekspansi bisnis, sehingga kebutuhan akan *input* tenaga kerja secara alami akan meningkat guna menjaga keseimbangan produksi. Dengan demikian, stabilitas laju

pertumbuhan ekonomi menjadi instrumen vital untuk mencegah terjadinya pengangguran siklis dan memastikan penyerapan tenaga kerja berjalan optimal dalam jangka panjang. Berlandaskan mekanisme transmisi teoretis tersebut, penelitian ini merumuskan hipotesis bahwa laju pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran terbuka, yang mengimplikasikan bahwa setiap peningkatan pertumbuhan *output* ekonomi akan berdampak pada penurunan angka pengangguran.

2.2.2. Hubungan Upah Minimum Provinsi dengan Pengangguran

Kenaikan upah minimum akan meningkatkan biaya operasional produksi bagi perusahaan, yang kemudian merespons dengan melakukan efisiensi berupa pengurangan permintaan tenaga kerja atau penghentian rekrutmen baru. Kondisi ini menyebabkan jumlah penawaran tenaga kerja melebihi permintaannya, sehingga menciptakan surplus tenaga kerja yang tidak terserap. Oleh karena itu, dari uraian di atas menjelaskan bahwa Upah Minimum Provinsi memiliki hubungan positif dengan tingkat pengangguran, di mana peningkatan beban biaya tenaga kerja berpotensi meningkatkan jumlah pengangguran (Neti & Sari, 2024).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Arisusanti & Bendesa (2023), menunjukkan bahwa Upah Minimum memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran, di mana variabel tersebut menentukan keputusan perusahaan dalam menyerap tenaga kerja. Semakin tinggi penetapan Upah Minimum Provinsi di suatu daerah, maka akan semakin membebani biaya produksi perusahaan yang mendorong efisiensi tenaga kerja, sehingga berdampak pada peningkatan angka pengangguran di wilayah tersebut.

Kenaikan standar upah minimum yang ditetapkan pemerintah sering kali dipandang oleh pelaku usaha sebagai tambahan beban biaya operasional yang memberatkan khususnya jika tidak sejalan dengan peningkatan produktivitas karyawan. Kondisi tersebut memaksa perusahaan untuk melakukan efisiensi dengan cara membatasi rekrutmen baru atau bahkan mengurangi jumlah tenaga kerja yang ada demi mempertahankan margin keuntungan perusahaan. Situasi ini juga memicu kecenderungan perusahaan untuk beralih dari padat karya menjadi padat modal yang mengakibatkan penurunan daya serap tenaga kerja secara signifikan. Berdasarkan dinamika ekonomi tersebut maka penelitian ini mengajukan hipotesis bahwa Upah Minimum Provinsi berpengaruh positif terhadap tingkat pengangguran terbuka yang mengimplikasikan bahwa setiap kenaikan upah minimum berpotensi mendorong peningkatan angka pengangguran.

2.2.3. Hubungan Investasi Asing dengan Pengangguran

Masuknya investasi asing tidak hanya membawa kapital tetapi juga transfer teknologi, peningkatan efisiensi, dan perluasan pasar yang secara keseluruhan akan membuka lapangan kerja baru, baik secara langsung maupun melalui efek pengganda (*multiplier effect*) pada sektor pendukung. Peningkatan kapasitas produksi akibat investasi ini secara otomatis menuntut penambahan *input* tenaga kerja untuk menjalankan operasional perusahaan. Oleh karena itu, dari uraian di atas menjelaskan bahwa investasi asing memiliki hubungan negatif dengan tingkat pengangguran, di mana peningkatan arus masuk modal asing berpotensi mengurangi jumlah pengangguran (Kuswiyati & Utomo, 2022).

Terdapat perbedaan temuan empiris yang signifikan mengenai dampak investasi asing terhadap tingkat pengangguran. Penelitian yang dilakukan oleh Kuswiyati & Utomo (2022) menunjukkan bahwa investasi asing berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran. Temuan tersebut mengonfirmasi bahwa masuknya modal asing dapat berfungsi efektif dalam menyerap tenaga kerja di negara penerima. Sebaliknya, penelitian Hidayah & Aji (2022) justru menemukan pengaruh yang positif, yang menunjukkan bahwa peningkatan investasi tidak selalu otomatis menciptakan lapangan kerja baru. Hal ini terutama terjadi jika investasi tersebut bersifat padat modal atau kurang memiliki keterkaitan yang kuat dengan perekonomian lokal.

Efektivitas investasi asing dalam mereduksi pengangguran pada dasarnya sangat ditentukan oleh karakteristik teknologi yang diterapkan, di mana dominasi investasi padat modal sering kali membatasi elastisitas penyerapan tenaga kerja lokal. Penggunaan teknologi tinggi dan otomatisasi yang dibawa oleh investor asing berpotensi menciptakan kesenjangan keterampilan (*skill mismatch*), sehingga tenaga kerja lokal yang tidak memenuhi kualifikasi spesifik akan sulit terserap ke dalam sektor modern tersebut. Akibatnya, lonjakan nominal investasi asing tidak dapat menjamin penurunan pengangguran secara signifikan jika tidak disertai dengan integrasi rantai pasok yang kuat ke sektor riil yang lebih padat karya. Kendati dihadapkan pada tantangan struktural tersebut, teori makroekonomi secara umum tetap mempostulasikan bahwa akumulasi modal asing akan memicu efek pengganda (*multiplier effect*) yang memperluas kapasitas ekonomi. Berdasarkan landasan pemikiran ini, penelitian mengajukan hipotesis bahwa Investasi Asing

berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran terbuka, dengan asumsi bahwa ekspansi modal tetap akan mendorong penciptaan lapangan kerja secara agregat.

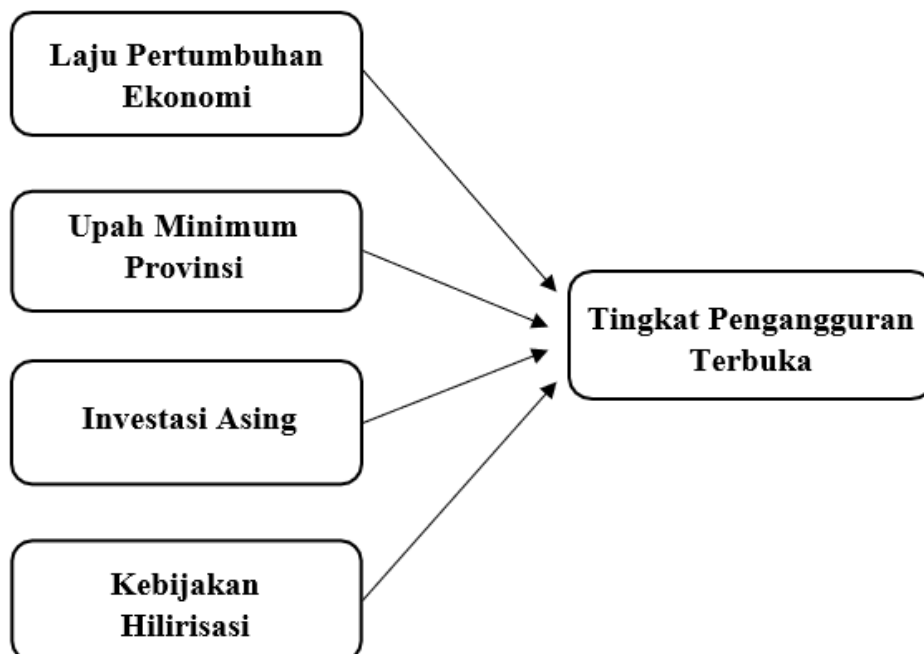
2.2.4. Hubungan Kebijakan Hilirisasi dengan Pengangguran

Sebagai pendorong utama industrialisasi nasional di sektor pertambangan dan perkebunan, kebijakan hilirisasi mendorong pembangunan smelter yang memerlukan investasi modal dan teknologi besar. Hal ini secara langsung menciptakan kebutuhan penyerapan tenaga kerja dalam skala luas di berbagai jenjang keahlian, baik pada tahap konstruksi maupun operasional. Dengan berpindahnya rantai nilai pengolahan dari luar negeri ke dalam negeri, kesempatan kerja juga turut berpindah dan tercipta. Oleh karena itu, kebijakan hilirisasi memiliki hubungan negatif dengan tingkat pengangguran, di mana penciptaan nilai tambah domestik melalui pembangunan industri pengolahan akan mendorong penyerapan tenaga kerja secara signifikan (Deddy et al., 2023).

Kebijakan hilirisasi memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan industrialisasi karena pada dasarnya hilirisasi merupakan wujud nyata dari strategi percepatan industrialisasi nasional berbasis sumber daya alam. Inti dari kebijakan ini adalah mewajibkan pengolahan bahan mentah di dalam negeri menjadi barang jadi atau setengah jadi yang secara otomatis menuntut pembangunan infrastruktur industri fisik seperti pabrik pemurnian atau smelter. Transformasi struktur ekonomi dari sektor ekstraktif menuju sektor manufaktur bernilai tambah inilah yang menciptakan permintaan tenaga kerja baru dalam jumlah besar. Mekanisme tersebut sejalan dengan temuan Ugbohmeh & Abdul (2023) yang membuktikan bahwa industrialisasi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap

pengangguran karena mampu menyerap angkatan kerja secara efektif. Hal ini juga diperkuat oleh penelitian Deddy et al. (2023) yang secara spesifik menemukan bahwa kebijakan larangan ekspor bijih nikel sebagai bagian dari hilirisasi berhasil menekan angka pengangguran.

Berdasarkan mekanisme ekonomi tersebut, dapat dibangun sebuah argumen bahwa kebijakan hilirisasi berfungsi sebagai katalisator industrialisasi yang secara alami memiliki daya serap tenaga kerja yang tinggi. Upaya peningkatan nilai tambah di dalam negeri ini memiliki hubungan terbalik dengan tingkat pengangguran terbuka karena ekspansi industri pengolahan akan mempersempit jarak kesenjangan antara jumlah angkatan kerja dan ketersediaan lapangan kerja. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, digambarkan dalam skema sebagai berikut:



Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran

2.3. Hipotesis

Hipotesis adalah pernyataan atau dugaan yang bersifat sementara terhadap suatu masalah penelitian yang kebenarannya masih lemah sehingga harus diuji secara empiris (Sugiyono, 2020).

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Diduga secara parsial laju pertumbuhan ekonomi, Investasi Asing, dan kebijakan hilirisasi berpengaruh negatif, sedangkan Upah Minimum Provinsi berpengaruh positif terhadap tingkat pengangguran terbuka di Pulau Sulawesi tahun 2011-2024.
2. Diduga secara simultan laju pertumbuhan ekonomi, Upah Minimum Provinsi, investasi asing, dan kebijakan hilirisasi berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka di Pulau Sulawesi tahun 2011-2024.